

448

Interaksi India-Indonesia*

K.N. RAMACHANDRAN

I

India dan Indonesia merupakan dua negara terbesar di Asia. Interaksi banyak tingkat antara kedua negara itu berasal dari zaman dahulu. Ia terputus selama zaman penjajahan di kedua negara ini. Interaksi itu telah dibuka kembali pada tahap terakhir zaman penjajahan itu, pada awal abad ke-20 sebagai akibat faktor yang sama, yaitu pergolakan nasional di kedua negara. Proses ini mau tidak mau menyebabkan diketemukannya kembali ikatan-ikatan yang dijalin di masa lampau. Hal itu merupakan landasan yang kokoh untuk saling mengadakan interaksi pada tahap kemerdekaan kedua negara yang mulai pada akhir tahun empat puluhan abad ini. Kendatipun interaksi itu pada saat-saat tertentu ditandai oleh hal-hal yang menjengkelkan dan persepsi-persepsi yang keliru, jika kita membuat neraca maka terlihat bahwa secara keseluruhan hal itu menguntungkan kedua negara dengan kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang secara tetap di masa yang akan datang.

II

Tahap awal interaksi ini (1946-1960) secara jelas menunjukkan segi-segi nasionalis dan bangkitnya kesadaran pan-Asia dan Afrika kedua negara itu. Dukungan India untuk kemerdekaan Indonesia setelah dibentuknya pemerintahan sementara India (1946) pada Asian Relations Conference yang diadakan di New Delhi (Maret 1947) dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memproyeksikan sifat Asia nasionalisme India di arena internasional. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia, bersama dengan India dan negara-negara Asia lainnya

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi India-Indonesia IV, Jakarta, 19-21 Agustus, 1985. Penterjemahnya, Daniel SETYAWAN, staf CSIS

yang baru muncul, untuk mengadakan Konperensi Asia-Afrika di Bandung (April 1955) berhasil menunjukkan segi-segi pan-Asia nasionalisme Indonesia. Segi bilateral interaksi itu tercermin pada: (a) perjanjian bantuan timbal-balik antara Angkatan Udara India dan Indonesia serta kerjasama yang dijalin Angkatan Laut kedua negara; (b) perjanjian untuk mengadakan dinas kurir dua bulan sekali antara kedua negara, dan (c) keputusan untuk menggalakkan perdagangan dan kerjasama.

Akan tetapi sejumlah hal yang menjengkelkan dan kesukaran timbul antara kedua negara itu dalam tahun enam puluhan dan baru setelah "Orde Baru" terbentuk menyusul penumpasan pemberontakan G-30-S (1965) interaksi itu dinormalisasi kembali.

Hal-hal yang menjengkelkan yang timbul sejak tahun 1960 adalah akibat beberapa faktor. India dan Indonesia berbeda persepsi mengenai sistem internasional dan cara-cara serta sarana untuk menyelesaikan persoalan dan masalah yang terdapat dalam sistem itu, terutama yang berhubungan dengan ancaman perang nuklir dan kecenderungan umum untuk mematikan aspirasi-aspirasi sah negara-negara Asia-Afrika yang baru muncul. Indonesia mulai menempuh jalan konfrontasi radikal yang akhirnya mengakibatkan negara itu keluar dari PBB (1965). Rezim Nasakom Soekarno, dengan mendapat dukungan kuat dari PKI yang sekarang sudah dibubarkan menempuh jalan yang berbeda dengan persepsi India mengenai tata internasional. Dipandang secara bilateral Indonesia menyesalkan yang dianggapnya sebagai sikap lunak India sehubungan dengan usaha Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat (1960-1961). Selanjutnya, Indonesia mengambil sikap netral terhadap konflik perbatasan Cina-India (1962) dan masalah-masalah yang berkaitan pada Konperensi Kolombo Negara-negara Non-Blok (Desember 1962) dalam mencari penyelesaian krisis itu. Bahkan sikap ini mengalami perubahan yang menguntungkan sikap Cina dalam tahun 1963 ketika berlangsung persekutuan Cina-Indonesia. Lagi pula Indonesia merasa bahwa India lebih mementingkan pertemuan non-blok kedua daripada konperensi Afro-Asia kedua -- yang merupakan usul Indonesia -- pada tahun 1963-1964 ketika masalah itu menjadi pusat perhatian. Indonesia juga mengambil sikap pro-Pakistan menjelang pecahnya Perang India-Pakistan tahun 1965 dan malahan menawarkan bantuan militer kepada Pakistan.

Di lain pihak, sekalipun sependapat dengan Indonesia mengenai perlunya diadakan perubahan-perubahan dalam sistem internasional, India berpendapat bahwa cara evolusi adalah yang paling tepat untuk hal itu karena perang nuklir antar negara adikuasa merupakan ancaman yang nyata -- suatu anggapan yang ditolak oleh Indonesia. Dari segi bilateral dan regional, India menganggap sikap Indonesia yang pro-Beijing (1963) dan pro-Pakistan (1965)

tindakan yang mengganggu kestabilan kawasan Asia Tenggara di tengah-tengah suatu sengketa besar di Vietnam.

Masalah-masalah pokok itu telah dipaparkan di sini hanya untuk menekankan kenyataan bahwa pada tahap ini solidaritas tahun-tahun sebelumnya dirusak oleh bermacam-macam masalah dan sikap terhadapnya. Dalam hal Indonesia, faktor-faktor politik dan ekonomi dalam negeri juga memegang peranan penting.

III

Berakhirnya konfrontasi terhadap Malaysia (1966) dan kembalinya Indonesia ke PBB melambangkan semangat baru. Pemberian prioritas kepada sektor pembangunan ekonomi yang terbengkalai, serta dipilihnya peranan pengembangan damai dalam sistem internasional, pada dasarnya menunjukkan arah Orde Baru. Faktor-faktor ini menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penghayatan interaksi bilateral.

"Iklim" yang dimaksudkan di atas pada hakikatnya berarti melenyapkan perbedaan-perbedaan atau dissonansi yang tajam dalam pendekatan kedua negara terhadap pelbagai masalah dan faktor dalam sistem internasional. Negara-negara adikuasa, perlombaan senjata, politik Non-Blok, Samudra Hindia, Asia Tenggara, Cina dan Asia Selatan merupakan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dimaksudkan.

Pertama, mengenai negara-negara adikuasa dan Sistem Internasional, sejak tahun 1966 India dan Indonesia banyak mengurangi perbedaan-perbedaan mereka sebelumnya. Kedua negara itu sekarang memandang pembicaraan serta perundingan negara adikuasa untuk mengendalikan perlombaan senjata dan menjamin stabilitas dunia sebagai suatu segi penting tata internasional dipandang perlu tetapi tidak cukup.

Kedua, India dan Indonesia sependapat bahwa perlombaan senjata merupakan suatu bahaya besar, dan bersama negara-negara non-blok lainnya mereka telah membantu menciptakan suatu iklim pendapat pro-perdamaian di PBB dan lain tempat. Pendekatan yang luas menuju perdamaian ini sangat mendesak karena, seperti dikatakan oleh Presiden Soeharto pada perjamuan makan untuk menyambut Presiden Fakhruddin Ali Ahmed (26 Mei 1975): "Ketegangan-ketegangan dunia belum hilang sama sekali." Beliau menambahkan: "Jurang antara negara kaya dan miskin masih menonjol, ancaman perang terbatas masih menghantui kita, sebab-sebab potensial pelbagai krisis ekonomi belum disingkirkan seluruhnya, kompetisi serta perebutan daerah pe-

ngaruh masih merupakan duri dalam daging, kekerasan masih digunakan untuk memaksakan kemauan sendiri."

Ketiga, demikian pula dalam gerakan non-blok, kedua negara telah memainkan peranan yang positif karena baik India maupun Indonesia ikut mendirikan kelompok non-blok itu. Perbedaan-perbedaan mengenai arah gerakan itu memang timbul pada tahun enam puluhan ketika Presiden Soekarno menempuh jalan yang radikal. Sebaliknya Orde Baru telah memilih "prinsip muafakat," demikian pula India. Hal ini dapat dilihat pada sikap kedua negara terhadap masalah-masalah yang dihadapi pertemuan para Kepala Negara atau Pemerintah Non-Blok yang ke-6 di Havana (September 1979). Pemimpin delegasi Indonesia Wapres Adam Malik mengatakan bahwa tujuan negara ini adalah "memperkuat solidaritas non-blok, bukan melemahkannya; meningkatkan kemampuan kolektif gerakan untuk bertindak, bukan untuk menguranginya." Ia menambahkan: "Negara-negara luar telah memanfaatkan konflik-konflik intern kita dengan cepatnya untuk mendiskreditkan citra kita dan merusak kemampuan gerakan." Senada dengan ini Menlu India Shri S.N. Mishra berkata: "Marilah kita mengakui secara terus terang bahwa bahaya bagi gerakan kita tidak hanya berasal dari faktor-faktor luar, tetapi juga dari perselisihan-perselisihan bilateral dalam persaudaraan kita. ... Tekanan-tekanan terhadap gerakan kita akan berlanjut ... tetapi kalau kita dapat bertindak dengan kematangan dan kebijaksanaan, bertindak bersama-sama seperti kita lakukan untuk mengakhiri penjajahan, kita dapat menjadikan gerakan non-blok sebagai motor untuk mendirikan tata dunia yang baru."

Keempat, kedua negara juga mempunyai persepsi yang sama mengenai peranan negara-negara besar di Samudra Hindia. Pandangan Indonesia adalah sama dengan pandangan India dalam arti bahwa kedua negara bertekad untuk menjadikan Samudra Hindia suatu zona perdamaian dan bahwa masalah-masalah keamanan regional harus ditangani oleh negara-negara pantai itu sendiri. Akan tetapi pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpengaruh juga berpendapat bahwa kalau tujuan ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat, dapat dicapai "keseimbangan antara negara-negara adikuasa." Hal ini jelas berarti bahwa tidak satu pun negara boleh memainkan peranan yang dominan di Samudra Hindia -- kiranya sampai diadakan suatu perjanjian yang memungkinkan negara-negara adikuasa itu mengundurkan diri dari militerisasi.

Kelima, dalam hal Asia Tenggara, kedua negara ini tidak mempunyai perbedaan-perbedaan tajam mengenai masalah-masalah dan perkembangan di kawasan ini sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia.

India menyambut baik pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan Agustus 1967. Pada hakikatnya India meman-

dang ASEAN sebagai kerangka yang penting -- cukup luwes untuk mengusahakan konsultasi dan pembentukan konsensus dalam mencari penyelesaian masalah-masalah regional tanpa tekanan atau campur tangan luar dan sebagai sarana untuk menggalakkan kerjasama ekonomi regional. Pandangan India ini mirip dengan konsep Indonesia mengenai "Ketahanan Regional" -- suatu proses negara-negara anggota kelompok itu memperkuat diri melalui usaha-usaha individual dan kolektif.

Mengenai perkembangan-perkembangan lain di kawasan Asia Tenggara, Kampuchea merupakan suatu persoalan di mana perbedaan-perbedaan yang tajam telah timbul di masa lampau tetapi sekarang telah berkurang.

Perbedaan-perbedaan itu memang tampak ketika Kampuchea tampil sebagai akibat penggulingan pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk oleh Marsekal Lon Nol yang didukung oleh Amerika Serikat pada tahun 1970. Langkah ini merupakan sebagian dari usaha Amerika Serikat untuk memperluas peperangan sampai Kampuchea karena tempat-tempat perlindungan Viet Cong berada di perbatasan Kampuchea dengan yang waktu itu disebut Vietnam Selatan -- sebuah terminal jalan Ho Chi Minh yang terkenal itu. Meluasnya peperangan sampai ke Kampuchea mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengadakan suatu konperensi guna membahas masalah itu pada bulan Mei 1970. Sebelas negara menghadiri konperensi tersebut tetapi India tidak karena merasa bahwa sebuah konperensi negara-negara non-blok akan lebih tepat untuk itu. Tidak ikut sertanya India itu disesalkan oleh Indonesia.

Masalah Kampuchea muncul kembali menyusul pengakuan rezim Heng Samrin pada tahun 1980 oleh India -- rezim yang telah menggulingkan rezim Pol Pot yang membantai rakyatnya (yang mulai berkuasa pada tahun 1975) dengan dukungan kuat dari Vietnam. Sementara India maupun Indonesia tidak mempunyai rasa simpati terhadap rezim Pol Pot, perbedaan pendapat timbul mengenai keabsahan rezim Heng Samrin sehubungan dengan peranan Vietnam yang menentukan dalam menumbangkan kelompok Pol Pot.

Pengakuan rezim Heng Samrin oleh India berdasarkan beberapa faktor. Pertama, karena menguasai sebagian besar dari wilayah itu, maka rezim Heng Samrin memenuhi syarat bagi pengakuan India. Kedua, telah dikemukakan oleh beberapa kalangan, terutama di India, bahwa pengakuan India adalah suatu tindakan pro-Soviet, karena rezim Pol Pot adalah pro-Beijing dan dengan segala alasan praktis India tidak menjalin hubungan dengan rezim itu.

Argumen ini tidak benar karena India tidak melaksanakan politik diskriminasi dalam soal pengakuan kecuali dalam hal Afrika Selatan. Kenyataannya India telah lebih dahulu memberikan pengakuannya terhadap kekuasaan

Milton Obote yang telah menggulingkan rezim Idi Amin di Uganda dengan bantuan Tanzania yang menentukan. Dalam kedua hal itu, rezim-rezim pembunuh rakyat digulingkan dengan bantuan luar. Dalam kedua hal itu kebijakan India ditentukan oleh sifat pembunuh rakyat dari rezim-rezim tersebut.

Pada semuanya itu dapat ditambahkan bahwa Indonesia pun tidak menyetujui kebijakan berdarah kelompok Pol Pot serta hubungan eratnya dengan Beijing. Indonesia tidak mengakui rezim Heng Samrin rupanya karena tekanan-tekanan politik regional, yaitu solidaritas dengan ASEAN. Indonesia kenyataannya telah mengakui Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK = Coalition Government of Democratic Kampuchea) yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan dibentuk pada tahun 1981. Patut dicatat pula bahwa dalam melaksanakan pendekatan ini, Indonesia tidak bersikap keras (*hardliner*) terhadap Vietnam. Ia mempertahankan garis komunikasi dengan Vietnam karena memandang Vietnam sebagai pelaku yang merdeka, suatu benteng terhadap ambisi Cina di kawasan itu. Indonesia juga mempunyai keberatan-keberatan yang serius terhadap *Khmer Merah*, komponen pro-Beijing CGDK yang kuat, dan bersikap lebih simpatik terhadap Son Sann dan kelompok-kelompok Sihanouk. Dipandang dalam kerangka ini maka pendekatan-pendekatan Indonesia secara kualitatif berbeda dengan pendekatan keras terhadap Vietnam dalam kelompok ASEAN.

Dengan latar belakang ini maka posisi India dan Indonesia adalah sama mengenai diteruskannya dialog dengan Vietnam. Mereka juga sama dalam memilih jalan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa di Kampuchea. Sebenarnya perbedaan hanya mengenai masalah pengakuan.

Keenam, persepsi kedua negara mengenai peranan Cina di kawasan Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya juga sama. Meskipun politik luar negeri Cina sekarang ini mencari koeksistensi damai, kedua negara itu (India dan Indonesia) yakin bahwa Cina merupakan negara besar di kawasan ini dan berambisi untuk menjadi negara adikuasa di bidang militer, ekonomi dan politik. Dalam ulasannya mengenai politik koeksistensi damai Cina, Radio Jakarta (20 April 1985) mengatakan: "Prinsip koeksistensi damai diumumkan oleh almarhum Perdana Menteri Zhou Enlai pada Konperensi Asia-Afrika di Bandung tiga puluh tahun yang lalu. Hendaknya diingat bahwa setelah Konperensi Asia-Afrika itu, RRC mulai mengambil sikap yang bertentangan dengan prinsip koeksistensi damai dengan menyerbu India pada tahun 1962 dan Vietnam pada tahun 1979." Akan tetapi, ia menambahkan, bahwa Cina tidak mau menyerbu Vietnam untuk kedua kalinya menyusul ofensif besar-besaran Hanoi di Kampuchea baru-baru ini menunjukkan bahwa Cina bermaksud mendapatkan kembali kepercayaan negara-negara tetangganya di Asia akan prinsip koeksistensi damai sebagai salah satu prinsip pokok politik luar negerinya.

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa peranan Cina sebagai kekuatan regional juga -- akan -- merupakan sumber ketidakpercayaan di Asia Tenggara karena bermacam-macam faktor, seperti persepsi bahwa Cina mengganggu stabilitas di masa lampau dan dukungannya yang aktif bagi pemberontakan-pemberontakan di kawasan ini (sekarang agak disembunyikan karena alasan-alasan praktis dan taktis) dan tujuan-tujuan jangka panjang negara itu. Lagi pula, masalah Cina Perantauan (OSC = Overseas Chinese) dan persoalan-persoalan mengenai kebangsaan mereka serta hubungan mereka dengan Daratan Cina dengan alasan-alasan ekonomi dan politik telah menimbulkan kekhawatiran di banyak negara Asia Tenggara. Kebijakan Cina sekarang ini untuk mendorong orang-orang Cina Perantauan yang kaya untuk menanamkan modalnya di RRC dan ikut memajukan keempat modernisasi agak mencekam karena negara-negara tersebut tidak menghendaki modal dialihkan keluar dari negara mereka masing-masing. Menurut pandangan India, masalah OSC itu merupakan bagian dari persoalan dalam negeri masing-masing negara yang harus diselesaikan oleh mereka sendiri, tanpa campur tangan atau tekanan luar mana pun. Indonesia pun telah menegaskan pandangan ini. Lebih penting lagi, seperti Indonesia, India pun merasa khawatir mengenai tujuan jangka panjang politik luar negeri Cina.

Peranan Cina mengganggu kestabilan di Indocina, khususnya usahanya memberi "pelajaran" kepada Vietnam (1979) dan ancamannya untuk memberi pelajaran yang kedua sejak itu, dukungannya kepada para pemberontak Kampuchea dari Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK) melawan rezim Heng Samrin, khususnya persekutuannya yang erat dengan *Khmer Merah* pemusnah bangsa dan komponen koalisi itu, merupakan masalah-masalah di mana India dan Indonesia mempunyai persepsi yang serupa walaupun tidak identik. Indonesia merasa simpatik terhadap kelompok Sihanouk dan Son Sann, tetapi mencurigai *Khmer Merah*. Selanjutnya India berpendapat bahwa sementara Vietnam adalah pusat kekuatan di Asia Tenggara, ia tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hegemoni apa pun di kawasan karena faktor-faktor geostrategis. Indonesia sependapat. Hanya Muangthai merasa terancam karena berbatasan dengan Laos dan Kampuchea yang merupakan sekutu-sekutu Vietnam. Kekhawatiran Muangthai dapat dimengerti dan memang juga dirasakan oleh kelompok ASEAN. Apa pun faktor-faktor tradisional dan historis yang telah membentuk persepsi Muangthai terhadap Kampuchea dan sebaliknya, dewasa ini ketegangan-ketegangan telah timbul sebagian besar sebagai akibat terlibatnya Muangthai dalam sengketa Kampuchea dengan memberikan tempat-tempat perlindungan dan bantuan material kepada para pemberontak dengan dukungan Cina dan Amerika Serikat.

Dipandang dari segi ini, dapat dikatakan bahwa penyelesaian masalah Kampuchea bersama tindakan-tindakan untuk membangun kepercayaan oleh

negara-negara Indocina yang berpangkal pada perundingan dan persetujuan dengan Muangthai akan menciptakan kondisi yang perlu untuk menjamin keamanan Muangthai. Indonesia mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi sikapnya terhadap Vietnam, yang secara kualitatif berbeda dengan sikap Muangthai, Singapura, Pilipina dan lebih dekat dengan Malaysia, menunjukkan bahwa Indonesia juga percaya bahwa dalam jangka panjang keamanan regional hanya dapat dibangun berdasarkan persetujuan regional serta pembangunan saling kepercayaan, bukan dengan bantuan luar.

Masalah penting lain lagi yang telah menimbulkan kekhawatiran kedua negara berkenaan dengan kerjasama militer Cina-Amerika Serikat. Baik India maupun Indonesia, dengan cara yang berbeda, telah sampai pada kesimpulan bahwa boleh jadi Cina melihat perkembangan ini, dalam arti strategis, sebagai persetujuan Amerika Serikat yang tak diucapkan untuk mencapai tujuan regionalnya dengan kedok usaha melawan Soviet.

Dengan kata lain, terlepas dari kekhawatiran mengenai kegiatan negara-negara adikuasa itu, India dan Indonesia mempunyai persepsi yang sama mengenai tujuan dan maksud jangka panjang Cina yang merupakan negara tetangga dekat di kawasan ini. Akan tetapi, persepsi ini tidak menghalangi kedua negara ini mengadakan hubungan dengan Cina pada tingkat yang berbeda.

Ketujuh, persepsi kedua negara mengenai perkembangan di Asia Selatan, terutama mengenai peranan Soviet di Afghanistan, juga penting. Baik India maupun Indonesia menentang kehadiran militer negara asing, khususnya negara adikuasa, di suatu negara Non-Blok. Akan tetapi, titik berat kedua negara ini agak berbeda. India memandang masalah ini secara keseluruhan dengan memperhitungkan rangkaian sebab dan kejadian yang mengundang campur tangan Uni Soviet itu, dan banyak di antaranya berasal dari persepsi Uni Soviet mengenai aktivitas negara-negara lain. Pandangan Indonesia seperti disuarakan oleh media dan para pemimpinnya menunjukkan kritik dan keberatan-keberatan terhadap peranan Uni Soviet semata-mata. Namun, perlu dicatat bahwa apa pun isi penekanan masalah-masalah yang berkaitan dengan Afghanistan, sebagai anggota penting kelompok Non-Blok, kedua negara mendukung sebuah kerangka untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini. Deklarasi politik yang telah disetujui KTT Non-Blok ke-7 di New Delhi pada bulan Maret tahun 1983 mendukung seruan Konperensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Non-Blok yang diadakan pada bulan Februari 1981. Sambil mengulangi pandangan ini para kepala negara atau pemerintah menyerukan suatu "penyelesaian politik atas dasar penarikan mundur pasukan-pasukan asing dan hormat sepenuhnya terhadap kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan teritorial dan status non-blok Afghanistan serta politik

sanaan sepenuhnya prinsip non-intervensi dan non-campur tangan. Mereka juga menegaskan kembali hak para pengungsi Afghanistan untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat dan hormat Mereka menyerukan kepada semua negara untuk mengendalikan diri agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan itu serta mengambil langkah-langkah yang sedemikian rupa sehingga akan menciptakan kondisi yang menjurus pada hubungan yang stabil dan harmonis antara negara-negara kawasan itu."

IV

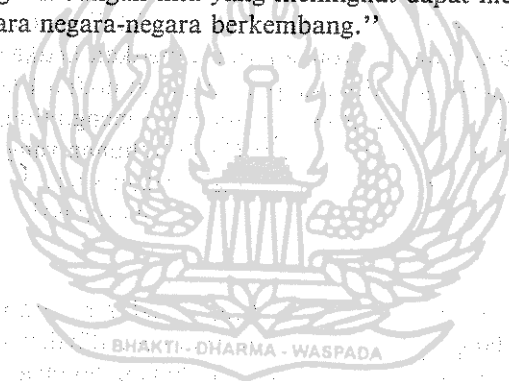
Mengenai hubungan bilateral antara kedua negara ini, interaksi dan rasa persaudaraan semakin meningkat sejak berdirinya Orde Baru di Indonesia. Hal itu mulai secara resmi ketika Menlu Adam Malik mengunjungi India bulan September 1966. Suatu dorongan kuat diberikan ketika PM India Ny. Indira Gandhi mengunjungi Indonesia pada bulan Juni-Juli 1969. Konsolidasi lebih lanjut diusahakan ketika Presiden Soeharto mengunjungi India bulan Desember 1980. Pertemuan Menteri Luar Negeri tahunan yang terus-menerus diadakan antara kedua negara ini telah memberikan suatu kerangka kelembagaan yang efektif untuk membicarakan masalah-masalah bilateral dan global.

Beberapa persetujuan penting telah dicapai kedua negara itu sejak tahun 1970-an. Karena bidang perdagangan India-Indonesia dibahas secara terpisah, di sini dapat dicatat perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Sebuah Memorandum Pengertian (Memorandum of Understanding) mengenai kerjasama di bidang ekonomi dan teknik ditandatangani pada bulan Februari 1979 di New Delhi sebagai tindak lanjut dari kunjungan Biju Patnaik, Menteri Urusan Baja dan Pertambangan India, ke Indonesia sebelumnya. Suatu perjanjian kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandatangani oleh kedua negara pada bulan Februari 1982 di Jakarta. Sebenarnya Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja telah mengatakan bahwa perjanjian itu "melambangkan kerjasama dalam kerangka kerjasama di bidang teknologi antara negara-negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi internasional baru." Mungkin perlu pula dikemukakan bahwa kedua negara telah mempunyai perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang penggunaan tenaga atom secara damai.

Kejadian-kejadian penting pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai dalam interaksi (hubungan) bilateral. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Kendati adanya perjanjian-perjanjian semacam itu, pengetahuan dan pengertian satu sama lain an-

tara kedua negara mengenai lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan bidang-bidang pengambilan keputusan lain yang penting masih harus melintasi tahap tinggal landas. Alasan-alasan kecenderungan ini harus dilihat pada tidak adanya jalinan-jalinan bilateral banyak tingkat yang intensif dan luas. Membangun jalinan-jalinan semacam itu harus menjadi tugas kedua negara dalam bagian kedua dasawarsa 1980-an ini dengan maksud untuk memperkuat dan memajukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan antara India dan Indonesia. Menyambut kedatangan Presiden Soeharto di India pada tanggal 1 Desember 1980, Presiden India waktu itu, Sanjeeva Reddy, menekankan pendekatan ini ketika ia mengatakan: "Kita akan tetap berusaha menemukan bidang-bidang kerjasama yang baru dan saling menguntungkan dan mengambil inisiatif untuk menyusun program-program baru di pelbagai lapangan sehingga hubungan kita yang meningkat dapat menjadi suatu model kerjasama antara negara-negara berkembang."



IMU KEPOLISIAN

Hubungan Bilateral Indonesia-India*

Kirdi DIPOYUDO

Fokus perhatian ulasan ini adalah hubungan antara Indonesia dan India sekarang ini, akan tetapi untuk memahaminya lebih baik, kita juga harus kembali sebentar ke masa yang silam. Penulis mengusulkan untuk membahas secara singkat hubungan antara kedua negara itu di masa lampau untuk memberikan latar belakang kepada tema kita. Secara berturut-turut kita akan membahas tahap-tahap perkembangan hubungan antara Indonesia dan India dan menggariskan kemungkinan-kemungkinan hubungan mendatang mereka dalam rangka mendapatkan hasil-hasil yang saling menguntungkan.

ASAL MULA HUBUNGAN

Hubungan antara Indonesia dan India bermula pada abad ke-5 ketika pedagang-pedagang India datang di Indonesia untuk berdagang emas, kayu cendana dan rempah dengan membawa kebudayaan dan agama mereka. Dalam proses itu mereka banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan politik negeri baru tempat mereka menjalin hubungan. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh Hinduisme dan Budhisme. Karya-karya kepahlawanan Ramayana dan Mahabarata dengan mitologi dan filsafatnya menjadi bagian kehidupan rakyat.¹

Akan tetapi pembangunan negeri-negeri jajahan oleh negara-negara Barat di Asia pada abad ke-18 dan ke-19 memisahkan Indonesia dari India. Hu-

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi India-Indonesia IV, Jakarta, 19-21 Agustus 1985.

¹Lihat Robert Van Niel, "The Course of Indonesian History," dalam Ruth T. McVey (ed.), *Indonesia* (New Haven: Yale University Press, 1963), hal. 272-273.

hubungan antara mereka yang erat terputus. Indonesia menjadi jajahan Belanda dan India jatuh di bawah kekuasaan Inggris. Namun, jalinan antara kedua bangsa itu tidak pernah putus sama sekali. Kebudayaan India telah meninggalkan pengaruhnya yang besar dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Segi-segi tertentu kebudayaan India, termasuk kesusasteraan, mistik dan asketiknya, masih sangat dihargai oleh rakyat Jawa Tengah. Agama mereka adalah suatu sinkretisme antara Hinduisme, Budhisme dan Islam. Sejumlah orang Indonesia, khususnya di Pulau Bali, masih menganut agama Hindu. Semuanya itu merupakan peringatan hidup akan adanya interaksi antara Indonesia dan India sejak abad ke-5.²

HUBUNGAN DIBUKA KEMBALI

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia dan India sekitar empat dasawarsa yang lalu mendekatkan kembali kedua negara. Pergerakan nasionalis Indonesia sangat dipengaruhi perjuangan kemerdekaan India yang mulai lebih dahulu. Ir. Soekarno, salah seorang pemimpin nasionalis Indonesia dan Presiden Pertama Indonesia, pernah mengatakan bahwa penyair agung Tagore mengilhaminya sebagai seorang pemula dalam pergerakan nasionalis dan bahwa Mahatma Gandhi telah meresapinya dengan keberanian keyakinan untuk meneruskan perjuangan sampai akhir logisnya, yaitu Indonesia Merdeka.³

Pemimpin-pemimpin baru Indonesia dan India bertekad untuk membarui hubungan yang putus akibat intervensi negara-negara kolonial. Dengan kesadaran baru memiliki latar belakang kebudayaan dan sejarah yang sama dan menderita penindasan dan pemerasan kolonial yang sama, pemimpin-pemimpin baru itu menunjukkan rasa solidaritas dan keinginan untuk saling membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang inheren dalam pembangunan negeri mereka masing-masing.⁴

Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, harus membela kemerdekaannya terhadap Belanda yang berusaha memulihkan kekuasaannya atas Indonesia dengan bantuan pasukan-pasukan Inggris yang ditugaskan untuk perlucutan senjata dan repatriasi

²Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965* (The Hague-Paris: Mouton, 1973), hal. 507-508.

³Lihat *Friendly Relations: Indonesia-India*, Special Issue No. 27, Kementerian Penerangan RI, 1958, hal. 7.

⁴Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 508.

pasukan-pasukan Jepang. Secara terang-terangan dan tegas India mendukung Indonesia dan menghimbau bangsa-bangsa lain untuk memberinya pengakuan internasional. Dalam suatu pidato pada 7 September 1946, hanya lima hari setelah pembentukan Pemerintah Sementara India, Nehru berkata: "Dengan perhatian dan kecemasan India mengikuti perjuangan bangsa Indonesia untuk kebebasan dan kepada mereka kita mengirimkan ucapan selamat kita."⁵

Pada Konferensi Hubungan Asia yang diadakan di New Delhi pada 23 Maret - 2 April 1947 dalam rangka solidaritas Asia, India menggunakan kesempatan itu untuk memperjuangkan kebebasan di Asia. Nehru mendukung perjuangan Indonesia dan menjadikannya suatu persoalan yang lebih luas dan minta perhatian bangsa-bangsa yang percaya akan kebebasan. Ketika menyambut delegasi Indonesia pimpinan Shahrir pada 1 April 1947, ia mengatakan bahwa Indonesia pada tahun-tahun belakangan memainkan suatu peranan penting dalam kejadian-kejadian di Asia dan dunia dan bahwa partisipasi Indonesia sangat penting bagi konferensi dan India.⁶

Ketika Belanda melancarkan aksi militernya pada 17 Juli 1947, India memberikan suatu reaksi yang tajam. Setelah mengadakan pembicaraan dengan Shahrir yang terbang ke New Delhi pada 22 Juli 1947, Nehru dengan tegas mengutuk aksi Belanda itu dengan mengatakan: "Tiada suatu negara Eropa, apa pun ia, yang boleh menempatkan tentaranya di Asia melawan bangsa Asia."⁷ Empat hari kemudian, India mengumumkan keputusannya untuk melarang penerbangan Belanda atas wilayahnya. Bersama Australia ia mengajukan persoalan Indonesia kepada PBB. Dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Nehru menegaskan bahwa aksi Belanda tersebut membahayakan perdamaian internasional dan oleh sebab itu ia menghimbau Dewan Keamanan agar mengambil tindakan-tindakan yang tepat.⁸

India juga mengecam aksi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda pada 18 Desember 1948 terhadap Indonesia, dan memprakarsai suatu langkah untuk menjadikan soal kemerdekaan Indonesia suatu persoalan bersama semua negara Asia dan masyarakat internasional. India menyelenggarakan suatu konferensi 18 bangsa mengenai Indonesia di New Delhi pada 20 Januari 1949. Konferensi ini menerima suatu resolusi yang mendesak agar segera di-

⁵Lihat Jawaharlal Nehru, *India's Foreign Policy. Selected Speeches, September 1946 - April 1961*, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1983, hal. 3.

⁶*Asian Relations, Being a Report of the Proceedings and Documentation of the First Asian Relations Conference, New Delhi, March-April 1947* (New Delhi: Asian Relations Organization, 1948), hal. 22 dan 79.

⁷Dikutip dari Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 32.

⁸*Security Council Official Records (1947)*, Supplement no. 16, Annexure 41, hal. 50.

adakan gencatan senjata, pasukan Belanda ditarik dan pemimpin-pemimpin Indonesia segera dibebaskan, dan minta kepada Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu.⁹ Negara-negara besar dan Dewan Keamanan memperhatikan resolusi itu dan mendesak agar diadakan perundingan untuk menyelesaikan sengketanya, lagipula membentuk suatu komisi bagi Indonesia untuk membantu menyelesaikan perselisihan itu. Sebagai hasil usaha-usaha itu akhirnya suatu Konperensi Meja Bundar dibuka di Den Haag pada bulan Agustus 1949. Pada 1 November 1949 dicapai kata sepakat mengenai kemerdekaan Indonesia dan pada 27 Desember 1949 Belanda secara formal mengakui kedaulatan Indonesia.¹⁰

Hubungan Indonesia dan India itu selanjutnya menjadi lebih kokoh berkat pendekatan bersama mereka terhadap urusan-urusan dunia. Kedua negara itu bekerjasama sangat erat dalam soal-soal politik luar negeri. Kebijaksanaan luar negeri Indonesia dan India didasarkan atas asas non-blok dan bertemu dengan satu tujuan: memelihara perdamaian dunia dan menjauhkan diri dari kedua blok kekuatan dalam perang dingin. Eratnya kerjasama antara kedua negara pada waktu itu terungkap dalam penandatanganan Perjanjian Persahabatan bulan Maret 1951, yang menentukan suatu perdamaian abadi dan suatu persahabatan yang tak bisa diubah.¹¹

Pada 28 April - 2 Mei 1954, perdana menteri Indonesia, India, Birma, Sri-langka dan Pakistan mengadakan pertemuan di Kolombo untuk menyatakan pandangan-pandangan kolektif mereka mengenai masalah-masalah waktu itu dan menghimbau negara-negara besar agar menciptakan perdamaian di Indocina. Mereka menyerukan gencatan senjata dan kemerdekaan negara-negara Indocina. Pada konperensi ini Indonesia mengajukan usul untuk mengadakan suatu konperensi negara-negara Asia dan Afrika yang lebih besar dalam rangka menyatakan kemauan kolektif negara-negara yang baru merdeka untuk ikut menangani urusan-urusan dunia. Konperensi membicarakan usul itu dan akhirnya mendukung suatu usul agar Perdana Menteri Indonesia menajaki kemungkinan diadakannya konperensi semacam itu.¹² Dalam kunjungannya ke India bulan September 1954, PM Ali Sastroamidjojo mendapat dukungan PM Nehru. Secara demikian kedua perdana menteri itu memainkan peranan penting untuk diadakannya Konperensi Asia-Afrika di Bandung bulan April 1955.¹³

⁹Lihat G.H. Jansen, *Nonalignment and the Afro-Asian States* (New York: Praeger, 1966), hal. 89.

¹⁰Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 59, 67-70.

¹¹*Ibid.*, hal. 508-509.

¹²Lihat G.H. Jansen, *op. cit.*, hal. 414.

¹³Lihat Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection. Konperensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955* (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal. 19; dan *Foreign Policy of India: Texts and Documents 1947-1959* (New Delhi, 1959), hal. 117.

Konperensi Bandung itu sendiri yang dihadiri 29 negara Asia dan Afrika, merupakan pernyataan sikap merdeka mereka di antara bangsa-bangsa dunia maupun suatu demonstrasi solidaritas dan keinginan mereka akan perdamaian dunia. Pada pembukaan Presiden Soekarno memperjuangkan penghapusan kolonialisme, sedangkan PM Nehru mengatakan pada sidang penutupan bahwa: "Kalau ada sesuatu yang ingin dikatakan Asia kepada mereka itu ialah: di masa mendatang tidak akan ada pendiktean; tiada "yes-men" di Asia ... atau di Afrika."¹⁴

Hubungan antara Indonesia dan India juga diperkuat oleh kerjasama bilateral antara mereka, khususnya di bidang angkatan bersenjata. India memberikan bantuan di bidang ini kepada Indonesia dan menyumbang pada peningkatan keahlian teknis personal angkatan-angkatan, khususnya angkatan udara.¹⁵

Kemauan baik India untuk Indonesia juga ditunjukkan pada waktu Indonesia diancam Pemberontakan Permesta pada tahun 1958. India menunjukkan simpatinya dengan usaha Indonesia untuk memelihara persatuannya.¹⁶

Untuk meringkas, hubungan antara Indonesia dan India pada dasawarsa 1950-an berkembang secara berangsur-angsur menjadi kerjasama berdasarkan kemauan baik satu sama lain. Ini diperkuat oleh pendekatan bersama terhadap soal-soal internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

HUBUNGAN MENJADI DINGIN

Berlawanan dengan harapan, pada tahun 1960-an hubungan antara Indonesia dan India menjadi dingin sebagai akibat berbagai faktor yang menjurus pada sederetan salah paham. Salah satu faktor penting perubahan ini adalah berubahnya persepsi prioritas-prioritas di Indonesia.

Di bawah "demokrasi terpimpin" yang dilaksanakan Presiden Soekarno, politik luar negeri Indonesia mendapat suatu tekanan baru dan suatu sifat yang berlainan. Cirinya adalah perjuangan militan melawan kolonialisme dan

¹⁴Untuk pidato Nehru lihat appendix dalam George McTurnan Kahin, *The Asian-African Conference* (Ithaca, N.Y., 1956), hal. 73.

¹⁵Lihat K.N. Ramachandran, "India-Indonesia Relations," dalam K. Subrahmanyam (ed.), *Self-Reliance and National Resilience* (New Delhi, 1975), hal. 145-146.

¹⁶*Ibid.*, hal. 146-147.

imperialisme dengan maksud agar Indonesia tampil sebagai pemimpin negara-negara Non-Blok dan secara demikian mendapat reputasi di dunia. Mengenai hal ini Presiden Soekarno berkata: "Juga dalam hubungan antara Republik dan dunia luar kita tetap berpegang teguh pada semangat Revolusi, yaitu untuk menghimpun segala kekuatan nasional dan internasional guna bertempur melawan dan akhirnya menghancurkan imperialisme dan kolonialisme, di mana pun mereka berada dan dalam bentuk apa pun mereka. Khususnya kita meletakkan tekanan atas perjuangan untuk membebaskan Irian Barat, karena di Irian Barat imperialisme-kolonialisme itu bercokol dalam daging dan darah kita sendiri."¹⁷

Presiden Soekarno memperkenalkan pandangan barunya mengenai urusan dunia dan kedudukan bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam pidatonya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Ia mendesak bangsa-bangsa yang baru merdeka untuk membangun dunia kembali karena pada hematnya: "Kita hidup, kita semua, dan di mana pun di dunia, di zaman pembangunan bangsa-bangsa dan buyarnya imperia. Ini adalah era bangsa-bangsa yang bangkit dan pergolakan nasionalisme."¹⁸ Pidatonya dijiwai tekad untuk memimpin pertarungan melawan imperialisme dan kolonialisme dan secara demikian menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang baru muncul dalam perjuangan mereka untuk suatu dunia baru berdasarkan kebebasan, perdamaian dan keadilan sosial.¹⁹

Kebijaksanaan luar negeri yang baru itu diperjuangkan secara terang-terangan pada Konperensi Non-Blok di Beograd bulan September 1961. Gagasan "new emerging forces" sebagai lawan "old established forces" itu menjadi fokus utama pidato-pidato Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa sifat antitetis kedua kekuatan itu akan menjurus pada suatu pertarungan yang tak terelakkan antara mereka, yang akhirnya akan menghasilkan kemenangan "new emerging forces."²⁰

Pada konperensi ini perpecahan antara Indonesia dan India muncul ke permukaan untuk pertama kalinya. Karena obsesinya dengan perjuangan kemerdekaan dan keadilan bangsa-bangsa yang baru merdeka melawan dominasi negara-negara mapan yang lama, Presiden Soekarno sangat sakit hati ketika PM Nehru dalam pidatonya meremehkan bahaya kolonialisme dan menekankan sebagai kewajiban pertama konperensi menciptakan iklim yang

¹⁷Soekarno, *Toward Freedom and the Dignity of Man. A Collection of Five Speeches by President Sukarno* (Jakarta: Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, 1961), hal. 106.

¹⁸*Ibid.*, hal. 123.

¹⁹Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 287.

²⁰*Ibid.*, hal. 314.

tepat dan baik untuk memungkinkan kedua negara adidaya untuk berunding dalam rangka mencegah perang dan meredakan ketegangan. Ia menganggap pernyataan Nehru itu sebagai penolakan terhadap tesisnya mengenai fungsi negara-negara Non-Blok.²¹ Akan tetapi perbedaan antara kedua pemimpin itu tidak substansial sifatnya, melainkan soal prioritas saja.

Di samping perbedaan-perbedaan itu terdapat banyak faktor di bawahnya yang mengganggu hubungan antara mereka. Usaha Nehru dalam Konperensi Bandung 1955 untuk tampil sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika dan sikap paternalistisnya merasa lebih tahu daripada lain-lain sangat tidak disenangi oleh banyak peserta dan khususnya Indonesia. Kemudian, ketika Presiden Soekarno memberikan bentuk baru kepada politik luar negeri Indonesia, maksud utamanya ialah menegaskan peranan Indonesia dalam urusan-urusan dunia dan mengincar kepemimpinan negara-negara Asia-Afrika. Itulah sebabnya mengapa ia secara persisten berusaha mengadakan suatu konperensi Asia-Afrika yang kedua. Tetapi gagasan itu sejak lama ditentang dan lawan terbesarnya ialah PM Nehru, yang tidak melihat gunanya mengadakan konperensi sebesar itu dan hanya meramalkan terjadinya perbedaan pendapat antara negara-negara peserta yang akan merugikan persatuan Asia-Afrika yang telah lemah. Presiden Soekarno sangat tersinggung oleh sikap PM Nehru itu, dan sejak itu hubungan antara kedua pemimpin itu menjadi semakin dingin.²²

Dengan demikian Konperensi Beograd dapat dipandang sebagai awal memburuknya hubungan antara Indonesia dan India. Sesudah bentrokan terbuka antara Soekarno dan Nehru itu, kedua negara kehilangan keeratatan hubungan tahun 1950-an. Perpecahan antara mereka muncul ke permukaan secara tragis sesudah agresi Cina terhadap India bulan september 1962. Keraguraguan Indonesia untuk mengutuk agresi Cina yang terang-terangan itu merupakan pengukuhan sikap Indonesia terhadap India. Indonesia tampak tak bersedia mengorbankan hubungannya yang berkembang dengan Cina untuk memihak India hanya karena India terjalin sangat erat dengan dirinya secara kultural sejak abad ke-5, dan juga tidak karena India selalu mendukung Indonesia selama perjuangan kemerdekaannya melawan usaha Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya.²³

Perbedaan pendapat yang lebih tajam antara Indonesia dan India muncul mengenai persoalan Malaysia ketika Indonesia melancarkan politik konfrontasinya terhadap negara ini. Tetapi India mengakui Malaysia sejak saat

²¹*Ibid.*, hal. 332.

²²*Ibid.*, hal. 334-335.

²³*Ibid.*, hal. 517.

proklamasinya dan menjadi pembelanya. Sebagai akibatnya, hubungan Indonesia-India menjadi lebih buruk lagi.²⁴

Suatu bahan percekocokan lain adalah gagasan mengadakan konferensi Asia-Afrika kedua. Presiden Soekarno sejak lama menyerukan diadakannya konferensi semacam itu. Konferensi Afro-Asia yang pertama di Bandung mendatangkan nama harum dan prestise bagi Indonesia dan dapat dipandang sebagai titik permulaan peranan aktif Indonesia dalam urusan dunia. Presiden Soekarno bertekad untuk menyelenggarakan konferensi kedua dan dengan maksud itu menggunakan segala kesempatan untuk membujuk negara-negara Asia dan Afrika agar mendukung gagasannya mengenai konferensi Bandung kedua. Pada tahun 1957, ketika masalah Irian Barat ditolak untuk dibicarakan oleh Majelis Umum PBB, ia menyatakan dalam pidato Hari Kemerdekaannya bahwa konferensi Afro-Asia yang kedua harus diadakan untuk mencari dukungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika bagi tuntutan Indonesia atas Irian Barat yang masih diperintah oleh Belanda. Sejak 1960 himbauannya untuk mengadakan konferensi semacam itu menjadi semakin kuat. Ia memperkenalkan doktrin politik luar negerinya yang baru mengenai adanya kontradiksi antara "new emerging forces" dan "old established forces," dan ia merasa bahwa melalui suatu konferensi Afro-Asia ia bisa berhasil mendapatkan penerimaan yang lebih luas bagi doktrinnya mengenai kebijaksanaan luar negeri yang anti-kolonialis dan anti-imperialis. Pada awal 1963, perjuangannya untuk mengadakan konferensi Afro-Asia yang kedua telah menjadi suatu keharusan baginya sehubungan dengan politik konfrontasi dengan Malaysia.²⁵

Sesudah Perang Cina-India tahun 1962, Cina mendukung diadakannya konferensi semacam itu karena ingin mempengaruhi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dengan maksud itu PM Chou En-lai mengadakan suatu kunjungan keliling di Afrika pada bulan Desember 1963 untuk mempropagandakan gagasan suatu konferensi Afro-Asia yang kedua dan membujuk negara-negara yang dikunjunginya itu agar mendukung Cina sebagai imbalan bantuan ekonomi dan teknik. Pada tahun 1962 Pakistan pun telah muncul sebagai pendukung gagasan konferensi Afro-Asia yang kedua. Negara ini memandang suplai senjata Barat kepada India menyusul perang Cina-India sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanannya. Oleh sebab itu Pakistan berusaha menjalin hubungan baik dengan Cina. Dengan demikian, ketika tahun 1963 berakhir, Cina dan Pakistan telah bergabung dengan Indonesia.²⁶

²⁴Lihat K.N. Ramachandran, *loc. cit.*, hal. 159-160.

²⁵Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 519.

²⁶*Ibid.*, hal. 520.

Di lain pihak, PM Nehru muncul sebagai lawan yang paling gigih terhadap diadakannya konperensi semacam itu. Ia menentang gagasan itu secara terang-terangan dan tegas sampai ia meninggal bulan Mei 1965, sehingga hubungan antara Indonesia dan India menjadi lebih tegang dan Indonesia terasing sama sekali. Presiden Soekarno tidak pernah mengampuni PM Nehru yang telah menghalang-halangi gagasannya untuk mengadakan konperensi Afro-Asia yang kedua dan sangat tidak senang dengan usaha Nehru untuk membujuk negara-negara lain, khususnya Mesir, agar menggagalkan rencana politiknya. Dalam kenyataan, perlawanan ini adalah alasan pokok membukanya hubungan Indonesia dengan India.²⁷

Untuk menghentikan prakarsa Indonesia, Cina dan Pakistan itu, India dan Mesir memperjuangkan diadakannya konperensi Non-Blok yang kedua sebelum konperensi Afro-Asia. Sebagai hasilnya Srilangka dipilih sebagai negara sponsor suatu pertemuan persiapan duta-duta besar negara-negara Non-Blok yang akan diadakan di Kolombo bulan Maret 1964 untuk mempertimbangkan kemungkinan mengadakan konperensi Non-Blok yang kedua. Pertemuan ini memutuskan bahwa konperensi itu benar-benar akan diadakan di Kairo paling lambat bulan Oktober tahun itu. Tetapi pertemuan itu juga terpaksa menerima suatu kompromi dengan memutuskan bahwa konperensi Non-Blok ini tidak menghalang-halangi diadakannya konperensi Afro-Asia yang kedua. Disetujui bahwa pada awal April 1964 akan diadakan pertemuan tingkat menteri di Jakarta sebagai persiapan bagi konperensi Afro-Asia yang kedua itu.

Pada pertemuan para menteri negara-negara Asia dan Afrika yang berlangsung pada 10-15 April 1964, Indonesia, Cina dan Pakistan bertrok dengan India dalam setiap persoalan. India hampir sendirian membela pandangannya, tetapi mencapai suatu kemenangan ganda. India mengajukan sebuah usul yang menjamin bahwa konperensi Afro-Asia yang kedua tidak akan mendahului konperensi Non-Blok yang kedua, dan pada waktu yang sama ia menggagalkan maksud Indonesia untuk menjadi tuan rumah konperensi Afro-Asia lagi. Akan tetapi kemenangan ini hanya memperlebar perpecahan Indonesia-India. Indonesia juga tidak senang dengan perjuangan India untuk menempatkan Malaysia pada daftar undangan pada waktu politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia mencapai puncaknya.

Konperensi Afro-Asia yang kedua akan diadakan di Algiers bulan Maret 1965, tetapi karena persiapannya tidak dapat diselesaikan pada tanggal itu, ia ditunda sampai 29 Juni. Penundaan ini akan mempunyai akibat fatal bagi hari depan pertemuan Afro-Asia. Pada 19 Juni Presiden Ben Bella disingkirkan

²⁷Ibid. hal 523

oleh suatu kudeta militer dan digantikan suatu dewan revolusi di bawah Kolonel Boumedienne. Perkembangan ini membantu negara-negara yang tidak menghendaki bahwa pertemuan puncak itu akan mencapai sasaran-sasarannya. Sebagai akibatnya, konperensi ditunda lagi sampai 5 November 1965, tetapi kebanyakan delegasi merasa bahwa konperensi itu tidak akan diadakan dan sejarah membuktikan bahwa mereka benar. Tidak pernah ada konperensi puncak Afro-Asia yang kedua.

Penundaan itu merupakan suatu pukulan hebat bagi para pendukung konperensi, khususnya Indonesia. Presiden Soekarno mempunyai alasan-alasan lain untuk mendesak agar konperensi diadakan sedini mungkin. Selain maksudnya untuk mendapatkan dukungan untuk memencilkan Malaysia dari negara-negara Asia dan Afrika, kenyataan bahwa Indonesia keluar dari PBB pada bulan Januari 1965 mendorongnya untuk mempercepat pelaksanaan gagasannya mengadakan suatu konperensi "the new emerging forces" (Conefo) yang telah diumumkannya dalam pidato Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1963.²⁸ Dalam hal ini ia mendapat dukungan penuh dari Cina yang bertekad untuk menjadi ko-sponsor konperensi yang dimaksud sebagai suatu tandingan PBB itu di mana Cina dan Indonesia akan memainkan peranan dominan.

Adalah maksud Presiden Soekarno mendapatkan dukungan konperensi Afro-Asia yang kedua di Algiers itu bagi gagasannya mengadakan Konperensi "New Emerging Forces" pada bulan Agustus 1966. Kalau gagasan ini diterima, Soekarno akan mendapat dukungan moral mayoritas bangsa Asia-Afrika, dan ia akan dapat mengatakan bahwa konsepsinya adalah ungkapan kemauan lebih dari 1.400 juta orang, lebih dari separuh penduduk dunia. Dengan demikian taruhan Presiden Soekarno tinggi sekali sehingga ia bekerja keras agar konperensi Afro-Asia yang kedua itu diadakan pada waktunya.

HUBUNGAN BAIK LAGI

Dengan munculnya Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto pada bulan Maret 1966, terjadi beberapa perubahan penting dalam politik luar negeri Indonesia. Kalau kebijaksanaan luar negeri Presiden Soekarno menyimpang dari asas Non-Blok dan bersekutu dengan Cina komunis, Pemerintah Orde Baru langsung menekankan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi di dalam negeri dan asas Non-Blok dalam kebijaksanaan luar negeri.

Akan tetapi perkembangan ini tak lain ialah suatu gerak kembali ke pokok-pokok kebijaksanaan luar negeri Indonesia. Sejak Proklamasi Ke-

²⁸*Ibid.*, hal. 534.

merdekaan, Indonesia bertekad untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Rumusan ini dianggap sebagai doktrin landasan politik luar negeri Indonesia yang tak berubah-ubah karena berakar pada Pembukaan UUD yang menetapkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan," dan bahwa Indonesia akan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dengan berkembangnya persekutuan-persekutuan perang dingin pada tahun-tahun berikutnya, ketentuan itu diartikan bahwa Indonesia harus tetap merdeka dari blok-blok kekuatan yang bersaing dan tidak memihak.

Pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki penyimpangan-penyimpangan di bawah Orde Lama dari kebijaksanaan semula itu dan menganutnya kembali. Pernyataan pokoknya terdapat dalam Ketetapan MPRS mengenai politik luar negeri No. XII/MPRS/1966. Sambil mengukuhkan kembali perlawanannya terhadap imperialisme dan kolonialisme, dan mendesak agar usaha-usaha untuk memajukan solidaritas Afro-Asia diteruskan, MPRS menjunjung tinggi asas koeksistensi damai dan kebijaksanaan bertetangga baik, dengan menegaskan bahwa Indonesia selalu ingin bersahabat dengan semua bangsa. Indonesia hendaknya juga menjalin hubungan ekonomi demi kepentingan nasionalnya. Bantuan dan pinjaman luar negeri dicari, tetapi hanya sebagai pelengkap. Demi kepentingan nasionalnya Indonesia hendaknya juga mengambil bagian lagi dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi internasional dan dalam perjuangan untuk memperbaiki Piagam PBB sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru di dunia.

Ketetapan ini menempatkan tekanan pada rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan itu ditandaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk mendapatkan dana dan keahlian yang diperlukan dari luar negeri. Ini berarti bahwa salah satu tugas pokok kebijaksanaan luar negeri Indonesia adalah mendapatkan pinjaman dari pemerintah kepada pemerintah dan menarik investasi asing dalam rangka pengalihan dan pengolahan sumber-sumber daya alam negeri dan menggalakkan perdagangan luar negeri.

Mengikuti pedoman-pedoman itu, Indonesia segera meninggalkan politik ganyang Malaysia dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya, dan dalam proses itu lahirlah ASEAN. Indonesia juga kembali ke gerakan Non-Blok yang murni dan melepaskan persekutuannya dengan RRC. Selanjutnya ia menghentikan proyek Conefo-nya dan kembali menduduki kursinya di PBB. Bersamaan dengan itu ia merundingkan penjadwalan kembali hutang-hutangnya dan perjanjian-perjanjian bantuan baru dengan para

kreditor Baratnya, serta berusaha menarik investasi asing. Sebagai hasilnya, dana-dana yang diperlukan untuk membiayai rehabilitasi perekonomiannya dan pembangunannya, khususnya di bidang ekonomi, mulai mengalir dalam jumlah-jumlah yang semakin besar.²⁹

Dengan berubahnya persepsi mengenai prioritas-prioritas nasional itu, politik luar negeri Indonesia mengambil "low profile" dalam arti bahwa ia tidak lagi di garis depan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya sekarang, ia menekankan kerjasama dan bukannya konfrontasi, dan dalam forum-forum internasional ia mengambil sikap yang moderat. Berbicara pada 4 April 1966, Menteri Luar Negeri baru Adam Malik menekankan tema kerjasama dengan semua negara.

Khususnya mengenai hubungan dengan India, Adam Malik menegaskan di depan Parlemen pada 5 Mei 1966: "Khususnya mengenai India, Pemerintah bermaksud memperluar hubungan dengan India dan meninjau kembali hubungan Indonesia dengan negara itu." Lebih lanjut ia mengatakan: "Kita tidak boleh lupa bahwa India adalah salah satu negara penting dalam politik internasional, khususnya dalam politik Afro-Asia dan Non-Blok."³⁰ India menyambut baik perkembangan ini. Berbicara dalam Rajya Sabha pada 8 Agustus 1966, Menteri Luar Negeri India Swaran Singh mengatakan bahwa dengan senang hati ia mencatat usaha Pemerintah Indonesia yang baru untuk memperbaiki hubungan dengan India.³¹

Sejak itu hubungan antara Indonesia dan India menjadi lebih baik. Proses ini dipermudah kenyataan bahwa Indonesia dan India memiliki banyak persamaan. Politik luar negeri kedua negara itu didasarkan atas asas-asas non-blok dan mempunyai tujuan yang sama: memelihara perdamaian dunia dan membangun suatu tata dunia baru di mana negara-negara berkembang dan non-blok ikut menyelesaikan masalah-masalah dunia berdasarkan persamaan dan keuntungan bersama dengan negara-negara maju.

Semakin baiknya hubungan itu terungkap dan ditunjang oleh pertukaran kunjungan para pemimpin dan pejabat kedua negara secara teratur. Bulan September 1966, Adam Malik mengadakan kunjungan ke India. Kunjungan ini mempunyai arti penting dan menandai membaiknya hubungan antara In-

²⁹Lihat Franklin Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno to Soeharto* (Ithaca-London, 1967), hal. 171; lihat juga Ruslan Abdulgani, *Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy*, Address on 14 August 1972 before the Annual Meeting of The Australian Institute of International Affairs, Dyason House, Melbourne.

³⁰Lihat *Indonesia's Foreign Policy Based on Pantja Sila Principles* (Jakarta, 1966), hal. 4-5, 13-14.

³¹*Ibid.*

donesia dan India. Ia mengadakan pembicaraan dengan PM Indira Gandhi dan pemimpin-pemimpin India lain dalam suasana keramahan dan saling pengertian. Mereka mencapai kata sepakat untuk mengaktifkan kembali delegasi-delegasi kebudayaan dan membuka kembali kerjasama di berbagai bidang. Mereka mengukuhkan kembali kepercayaan mereka akan asas-asas non-blok sebagai alat untuk mencegah timbulnya peperangan, memelihara dan memperkuat perdamaian internasional dan mengembangkan kerjasama internasional.³² Menteri Luar Negeri India mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan Januari 1967 dan mengadakan pembicaraan panjang lebar dengan rekan Indonesiannya. Mereka menekankan perlunya meneruskan usaha memperkuat hubungan bilateral di bidang ekonomi dan teknologi. Mereka juga sepakat untuk mengadakan kontak-kontak tingkat menteri setiap tahun dalam rangka pertukaran pandangan mengenai masalah-masalah dunia dan menilai kemajuan yang dicapai dalam usaha memperkuat hubungan bilateral.³³

Bulan Juni 1969 PM Indira Gandhi mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Pers Indonesia menyambut baik kunjungan ini dan mengatakan bahwa persahabatan yang kokoh antara kedua negara besar Asia itu adalah vital bagi perdamaian dan kestabilan dunia. Kunjungan ini memungkinkan kedua negara untuk sampai pada suatu pendekatan bersama terhadap masalah-masalah regional dan global. Ny. Gandhi dan Presiden Soeharto mengukuhkan kembali kepercayaan mereka akan sikap non-blok dan koeksistensi damai antara bangsa-bangsa.³⁴

Bulan Mei 1975, Indonesia mendapat kehormatan kunjungan Presiden Fakuruddin Ali Ahmad. Pada kesempatan ini Presiden India itu mengatakan bahwa ruang lingkup interaksi antara Indonesia dan India luas dan bahwa ia percaya usaha kedua negara untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang spesifik akan mendatangkan hasil-hasil yang positif. Di pihak lain Presiden Soeharto mengatakan bahwa wajarlah kalau India dan Indonesia sebagai tokoh konperensi Afro-Asia yang pertama memperkuat lagi Semangat Bandung. Ia menyebutkan abad-abad jalinan kebudayaan, gagasan-gagasan mulia dan bantuan berharga India bagi kemerdekaan Indonesia.³⁵

Di bawah Pemerintah Janata pun India sampai batas-batas tertentu berhasil memperluas hubungan India dengan negara-negara ASEAN dan khusus-

³²*Asian Recorder* 1966, hal. 7312-7313.

³³Lihat *Foreign Affairs Record*, Ministry of Foreign Affairs, Government of India, January 1967, hal. 6.

³⁴Lihat joint communique dalam *Foreign Affairs Record*, August 1969, hal. 139-140.

³⁵Lihat *Antara*, 27 Mei 1975 A; dan *Suara Karya*, 28 Mei 1975.

nya dengan Indonesia. Dalam kunjungannya ke India bulan November 1978, Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa ASEAN juga mulai menganggap penting kerjasama dengan India. Ia menceritakan bahwa keinginan India untuk mempunyai hubungan yang lebih erat dengan ASEAN disambut dengan baik oleh negara-negara yang bersangkutan.³⁶

Bulan Desember 1980 Presiden Soeharto mengadakan suatu kunjungan kenegaraan ke India dengan maksud untuk lebih memperkokoh ikatan persahabatan dan saling pengertian yang telah ada antara Indonesia dan India dan untuk bertukar pandangan mengenai soal-soal internasional. Setibanya di New Delhi ia berkata: "Bagi kami India bukan hanya suatu bangsa yang mewaris suatu sejarah dan kebudayaan yang sangat beradab yang menjalin hubungan dengan Indonesia banyak abad yang lalu. Bagi kami India adalah sahabat, sahabat karib kami. Sebagai sahabat, sebagai kawan seperjuangan dan sebagai sesama anggota gerakan Non-Blok, kedua negara kita harus meningkatkan kerjasama kita bagi kemajuan dunia." Ia mengadakan pembicaraan panjang lebar dengan PM Indira Gandhi mengenai masalah-masalah internasional dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa negara-negara Non-Blok dan berkembang harus bekerjasama untuk meredakan situasi ketegangan yang diciptakan persaingan dan konfrontasi negara besar khususnya di kawasan Asia.³⁷

Pada bulan September 1981, PM Indira Gandhi mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia dengan maksud untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara India dan Indonesia dan untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah bilateral, regional dan global dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Dengan Presiden Soeharto ia membicarakan soal-soal bilateral dengan maksud untuk menambahkan kerjasama politik dan ekonomi yang lebih luas pada ikatan kebudayaan yang telah berabad-abad antara kedua negara.³⁸

Kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa hubungan hangat di masa lampau antara Indonesia dan India telah dipulihkan. Sejak 1969 hanya muncul beberapa persoalan yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara. Yang pertama adalah sikap India terhadap konperensi yang diadakan di Jakarta pada bulan Mei 1970 untuk membahas masalah Kamboja, yang kedua dukungan India untuk gerakan kemerdekaan di Bangladesh tahun 1971. Persoalan yang ketiga adalah pengakuan India bagi Pemerintah Heng Samrin di Kampuchea. Akan tetapi persoalan-persoalan itu tidak merusak hubungan erat yang dijalin sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia.

³⁶Lihat *Antara*, 15 November 1978 B.

³⁷Lihat *Kompas*, 5 Desember 1980; lihat juga S.S. Battacharya, "India-Indonesia Relations," dalam *Strategic Analysis* (Delhi), Februari 1981.

³⁸Lihat *Kompas*, 25 September 1981.

Hubungan antara Indonesia dan India meliputi kerjasama ekonomi dalam bentuk perdagangan, pinjaman dan usaha patungan. Ketika Adam Malik mengunjungi India pada tahun 1966, sifat mendesak dan arti pentingnya kerjasama ekonomi antara kedua negara digarisbawahi. India memberikan pinjaman sebanyak Rs 100 juta kepada Indonesia untuk membeli barang-barang India. Bulan Desember 1966 Indonesia mengadakan perundingan dengan suatu delegasi dagang India dan sebagai hasilnya ditandatangani suatu persetujuan dagang.

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India itu mendapatkan suatu momentum baru dengan ditandatanganinya suatu persetujuan lain mengenai kerjasama ekonomi yang lebih luas pada 15 Februari 1979. Ini meliputi pembelian 2 juta ton pelet bijih besi India untuk jangka waktu yang panjang. Diusulkan agar dibentuk suatu satuan tugas untuk merinci kerjasama ekonomi di bidang metal non-besi, industri engineering termasuk pembuatan mesin dan alat-alat mesin, tenaga listrik, pengangkutan, eksplorasi geologi, semen, industri gula, pendirian pusat-pusat latihan untuk mengembangkan tenaga kerja yang diperlukan, dan koperasi pedesaan dengan tekanan pada pengembangan produksi dan pengolahan susu sapi.

Dalam kunjungan Presiden Soeharto ke India pada tahun 1980, segi ekonomi hubungan Indonesia-India juga dibahas secara lebih terinci. Kedua negara sepakat untuk menyelidiki kemungkinan diversifikasi dan perluasan hubungan dagang. Ketika PM Indira Gandhi mengunjungi Indonesia tahun 1981, kemungkinan memperluas kerjasama ekonomi bilateral juga dibicarakan. Namun sejauh ini kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India masih jauh dari optimal.

Pada tahun 1980 ekspor Indonesia ke India adalah seharga US\$45,8 juta. Ekspor ini terdiri atas rempah-rempah, kertas dan papan kertas, minyak kelapa sawit dan minyak lain, bahan kimia, semen, pupuk buatan dan lain-lain. Impor Indonesia dari India pada tahun 1982 adalah seharga US\$225,57 juta dan meliputi mesin pembangkit listrik, mesin listrik, kaca, balok besi dan baja, tekstil, gula, beras, bahan kimia, alat-alat medis dan lain-lain. Pada tahun 1984 impor Indonesia dari India adalah seharga US\$55,23 juta dan eksportnya ke India US\$38,05 juta.³⁹

Di bidang usaha patungan, sejumlah proyek telah disetujui, sebagian besar sudah dilaksanakan, sedangkan lain-lain masih dalam pertimbangan. Usaha-usaha patungan itu adalah di bidang tekstil, obat-obatan, pabrik baja, bubur

³⁹Lihat *Ekspor 1980 dan Ekspor 1984*, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1981 dan 1985. Untuk impor Indonesia dari India pada tahun 1982 dan 1984 lihat *Impor 1982 dan Impor 1984*, yang diterbitkan Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1983 dan 1985.

kertas, minyak goreng dan lain-lain. Bulan Januari 1981, Project Trading Corporation of India (PEC), suatu filial State Trading Corporation of India, memenangkan suatu kontrak untuk membangun suatu pabrik semen di Indonesia.⁴⁰

KESIMPULAN

Dalam periode sesudah normalisasi hubungan antara Indonesia dan India pada tahun 1966, telah dicapai beberapa kemajuan. Hubungan menjadi lebih baik, tetapi juga ada kegagalan-kegagalan yang perlu ditinjau kembali. Hubungan antara kedua negara dewasa ini adalah baik dan bersahabat, tetapi belum seperti seharusnya. Hubungan dan kerjasama itu dapat ditingkatkan, khususnya di bidang ekonomi. Juga harus diakui bahwa kedua bangsa tidak banyak saling mengenal, biarpun mempunyai tradisi budaya besar yang sama dan mempunyai banyak persamaan. Karena itu, Indonesia maupun India hendaknya menaruh perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan mereka satu sama lain. Di Indonesia studi India harus digalakkan dan di India studi Indonesia.

Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan kenyataan kehidupan, bahwa hubungan antarbangsa untuk sebagian besar akan ditentukan oleh persepsi kepentingan dan prioritas-prioritas nasional masing-masing negara. Dengan demikian, pergesekan antara bangsa-bangsa bisa terjadi berulang kali. Tidaklah realistik untuk mengharapkan bahwa hubungan Indonesia-India di masa depan akan bebas dari ketegangan atau pasang-surut. Yang dapat dan harus kita lakukan ialah menjamin agar hubungan bilateral kita begitu kokoh sehingga mampu menghadapi ketegangan-ketegangan akibat pergeseran aliran-aliran percaturan politik dunia.

⁴⁰Lihat *Merdeka*, 30 November 1984; lihat juga S.S. Battacharyar, *loc. cit.*; dan Thee Kian-Wie, "Indonesia as a Host Country to Indian Joint Ventures," dalam *Multinationals from Developing Countries*, hal. 133-144.